BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan. Dalam perlindungan yang harus diberikan itu termasuk perlindungan dari bencana sehubungan dengan hal tersebut pemerintah melaksanakan program-program penanggulangan bencana yang dimuat manajemen bencana. Dalam pernyataan ini mempunyai makna, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hak-hak dasar, termasuk perlindungan dan hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman, resiko termasuk dampak bencana.

Bahwa perlindungan merupakan hak warga negara tersebut, perlindungan yang harus diberikan oleh negara kepada warga negara tersebut termasuk perlindungan dari bencana. Bencana merupakan suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, bencana tidak terjadi begitu saja.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah melaksanakan program-program dalam rangka penanggulangan bencana yang di muat lingkup manajemen bencana, sejalan dengan tujuan konstitusi yang telah disebutkan di atas, maka suatu keharusan pemerintah untuk melakukan perlindungan dalam hal penanggulangan bencana yang dimuat pada suatu lingkup manajemen bencana

yang efektif dan efisien khususnya dalam penanggulangan bencana longsor. Penanggulangan bencana longsor memang tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja yaitu pemerintah, akan tetapi semua pihak harus aktif berperan termasuk masyarakat pun harus berpartisipasi dalam penanganan masalah longsor ini.

Pemerintah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor, pemerintahan pusat yaitu mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankannya hidupnya sebagai warga negara. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia. Tetapi pelayanan yang baik, melalui kemampuan optimal untuk melaksakan tugas pokok yang dikemukakan di atas, hanya mungkin terwujud jika pemerintahan memiliki power yang cukup. disini, pemerintahan yang kuat jelas diperlukan, dengan catatan bahwa kekuatan itu untuk mengutamakan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Pemerintah membuat Undang-Undang tentang penanggulangan bencana yang dituangkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Undang-Undang ini dibuat sebegai hukum mengenai proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Majalengka. Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang ini dimulai dari prabencana, pada saat bencana hingga proses pemuliha pasca bencana diatur di dalamnya.

Kondisi geografis Jawa Barat rawan bencana salah satunya Kabupaten Majalengka berbagai macam bencana. Kondisi daerah Kabupaten Majalengka memiliki geografis, dan demografis yang memungkinkan terjadi berbagai bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan terntu dapat menghambat pembangunan nasional. Kemudian yang menjadii rawan bencana di jawa barat yaitu berada di kabupaten majalengka.

Guna mendukung sasaran dalam penanggulangan bencana alam yang diakibatkan kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan dan angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman atau ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi dan pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antara manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, konflik dengan alam, alasan idiologi, agama dan politik.

Kabupaten majalengka dalam rangka menyelenggrakan perlidnungan kepada masyarakat dalam hal penanggulangan bencana membuat satu intansi yang mengurusi urusan bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka yang berkewajiban untuk menyelanggarakan penanggulangan bencana yang meliputi pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana, pentingnya dari dampak bencana, penigkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana serta pemulihan kembali sarana dan prasarana akibat bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka menjalankan fungsi dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Bupati majalengka yang tertuang dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Oraganisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka menjelaskan tugas dan fungsi BPBD untuk menjalankan penyelenggaraan perlindungan kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana yang ada di daerah di kabupaten majalengka.

Berdasarkan data daerah yang pernah terjadi bencana longsor yang ada di Kabupaten Majalengka ada beberapa kecamatan yang ada di seluruh kabupaten majalengka yang mengalami kejadian bencana tanah longsor berikut data di bawah yang pernah terjadi longsor antara lain :

Tabel 1.1
Data Kejadian Tanah Longsor di Kabupaten Majalengka Tahun 2016

No	Uraian	Kecamatan	Kejadian Longsor
1	Potensi Bencana	Argapura	14
		Bantarujeg	12
		Banjaran	7
		Cingambul	11
		Cikijing	4
		Lemahsugih	21
		Maja	9
		Majalengka	6
		Malausma	7
		Panyingkiran	1
		Rajagaluh	13
		Sindangwangi	9
		Sindang	3

		Talaga	6
		Ligung	7
		Leuwimunding	13
		Jatitujuh	3
		Kadipaten	2
		Cigasong	10
		Dawuan	7
		Kertajati	1
		Palasah	1
		Sumberjaya	6
		Kasokandel	1
		Jatiwangi	4
		Sukahaji	1
	Jumlah		173

Sumber : BPBD Kabupaten Majalengka 2016

Berdasarkan data dan informasi dari BPBD Bencana di Kabupaten Majalengka selama kurun waktu 1 tahun terakhir di wilayah Desa Cisalak Desa Lemasugih Kabupaten Majalengka terdiri dari 26 Kecamatan dimana ada beberapa kecamatan yang setiap musim hujan selalu mengalami bencana tanah longsor seperti Kecamatan Lemahsugih, Kecamatan Argapura, Kecamatan Bantarujeg, Kecamatan Cingambul, Rajagaluh, Kecamatan Leuwimunding, Kecamatan Maja, dimana lokasi kecamatan tersebut berada di daerah dataran atas yang berbatasan langsung dengan pegunungan yang mengakibatkan ketika sudah memulai musim hujan akan terjadi bencana tanah longsor.

Kecamatan Lemahsugih termasuk kecamatan yang memiliki wilayah rawan longsor da cukup berbahaya. Desa yang memiliki tingkat kerawanan bencana longsor cukup tinggi adalah Desa Cigaleuh, Desa Cisalak, Desa Margajaya, Desa Sadawangi, banyak sekali daerah perbukitan di wilayah itu yang

kemiringannya hingga 40%. Meski demikian warga desa setempat tetap memanfaatkan wilayah tersebut sebagai tempat untuk bermukim, kendati mereka mengetahui bahwa bahaya longsor mengancam mereka. Dengan asalan sudah mengupayakan beberapa penganggulangan yang mereka yakini dapat mencegah longsor, merekapun tetap bersikukuh tinggal di daerah relatif rawan longsor.

Kestabilan lereng yang tanahnya berlempung sangat dipengaruhi oleh banyaknya air yang meresap kedalam lereng. Infiltrasi air ke dalam tanah, menghilangkan tekanan air pori negatif dan menaikkan tekanan pori positif yang mengurangi kuat geser tanah. Selain itu, akibat infiltrasi air hujan, berat tanah bertambah. Lokasi-lokasi pada bukit yang berbentuk menikung, di mana tempat tersebut merupakan tempat pertemuaan air hujan yang berasal dari bukit-bukit di dekatnya mempunyai potensi longsor yang tinggi.

Bencana alam berupa tanah longsor sering terjadi di Desa Cisalak sebagian wilayahnya berupa tebing curam dan pegunungan. Menurut warga setempat sudah lebih dari 5 bulanan mulai dari Bulan Januari 2017 sampai bulan Juni 2017 sering terjadi longsor ketika musim hujan tiba,puluhan rumah milik warga blok cisalak, tepatnya di RT 06 RW 04 Desa Cisalak Kecamatan Lemahsugih dilaporkan mengalami kerusakan akibat pergerakan tanah. Empat rumah diantaranya tergolong parah, sehingga harus dikosongkan karena dapat mengancam keselamatan. Terkait dengan musibah tersebut BPBD Kabupaten Majalengka, telah mengambil langkah – langkah penanganan termasuk melakukan evakuasi pada pemilik rumah yang mengalami rusak parah serta bantuan logistik. Menurut Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Kabupaten Majalengka H.

Elon Sukalam menambahkan bahwa wilayah desa tersebut memiliki kondisi demografi perbukitan dan pegunungan yang membuat bencana longsor sering terjadi yang mengakibatkan banyak rumah warga rusak parah, kami akan selalu siap dan akan langsung terjun ke lokasi bencana bila mana ada laporan bencana yang masuk.

Penelitian yang sama pernah dilakukan oleh beberapa orang seperti Musyadad, 2015 dengan judul skripsi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak. Teori yang digunakan dalam penelitian menurut Hersey, Blanchard dan Johson dalam buku Wibowo 2011: 102) menyebutkan bahwa acuan mengetahui kinerja organisasi, dilihat dari indikator Tujuan, Standar, Alat atau Sarana, Kopentensi, Motif, Peluang, Umpan Balik. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif hasil yang dicapai penelitian masih belum maksimal dan masih banyak kekurangannya.

Melihat penelitian diatas persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang diambil yaitu sama-sama meneliti mengenai Kinerja BPBD sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan penelitian diatas menggunakan menggunakan teori menurut Hersey, Blanchard dan Johson dalam buku Wibowo 2011: 102) yang menyebutkan 7 indikator menilai kinerja BPBD sedangkan penelitian yang diambil mengunakan teori Baban Sobandi yang menyebutkan 4 indikator untuk menilai kinerja dari BPBD

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Majalengka (Studi Menanggulangi Bencana Longsor Di Desa Cisalak)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana Kinerja Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Majalengka (BPBD) di Kabupaten Majalengka (Studi Kasus menanggulangi bencana longsor Di Desa Cisalak) dilihat dari faktor *output* , Hasil , Kaitan Usaha dengan pencapaian,dan Informasi penjelas.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui kinerja badan Maksud dari tujuan penelitian untuk mengetahui dan Kinerja Aparatur Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kabupaten majalengka (Studi Kasus menanggulangi bencana longsor)

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ;

1. Mengerti dan memahami *output* dari Kinerja Aparatur Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kabupaten majalengka (Studi Kasus menanggulangi bencana longsor)

2. Mengerti dan memahami Hasil dari Kinerja Aparatur Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kabupaten majalengka (Studi Kasus menanggulangi bencana longsor)
3. Mengerti dan memahami Kaitan usaha dengan pencapaian dari Kinerja Aparatur Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kabupaten majalengka (Studi Kasus menanggulangi bencana longsor)
4. Mengerti dan memahami Informasi penjelas dari Kinerja Aparatur Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kabupaten majalengka (Studi Kasus menanggulangi bencana longsor)

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

   Mengaharapkan Penelitian ini dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan, khususnya pada kajian Kinerja Aparatur dan juga dapat memberikan manfaat ilmu di bidang pemerintahan.
2. Secara Praktis
   a. Bagi penelitian, yaitu diharapkan penelitian dapat memahami dan menambah wawasan serta dapat memberikan manfaat tentang kinerja aparatur badan penanggulangan bencana daerah di kabupaten majalengka.
   b. Bagi pemerintah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka diharapkan penelitian ini menjadi salah satu data maupun rujukan kinerja aparatur yang baik dalam memberikan kinerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Majalengka.
   c. Bagi masyarakat, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat tentang kinerja aparatur yang

diberikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten majalengka dalam memberikan kinerja.